

DINAMIKA PERAN POLITIK TUAN GURU DI LOMBOK ERA REFORMASI

Oleh:

Muh. Samsul Anwar

Ketua Lembaga Kajian Islam dan Kebangsaan Nadlatul Wathan (LKIK-NW)

Email: anwarlombok20@gmail.com

Abstract

Regional autonomy implementations have implications for local politic expression. Political actor and community participation in local politic increase, emerge local politic actors, and local politic culture that it play the role of local politics, such as “Tuan Guru” (teacher) in Lombok. Tuan Guru has the more prominent role from the others inside Lombok local politics.

There are three kind of Tuan Guru who are involved in practical politics; first, a Tuan Guru who politician that he is focuses his activity in the practical politics. His political activity is more dominant than teach about religion to the pupils (jamaah) or the rasta (santri). Second, Tuan Guru who involve in the pratical politics, but only to be a vote gather. This one thought himself doesn’t has politic capacity, especially political politics. Some people as a vote gather gain aid for his “pesantren” (boarding school) and “madrasah” (school). He prefer to teach about religion for the pupils than do pratical politics activity. Third, Tuan Guru who doesn’t take part of politics. Tuan Guru focus on religion to keep his peace of soul, statics, and conservative. He prefer oriented for the akhirat’s life (dooms day), so he looks closed from outsider dynamic inside to determine politic affiliation.

Keywords: *Decentralization, politics, and tuan guru.*

Abstrak

Implementasi otonomi suatu daerah, berimplikasi pada ekspresi politik lokal. Yaitu berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik, munculnya aktor dan budaya politik lokal, seperti Tuan Guru yang memainkan peran politik dalam politik lokal Lombok.

Keterlibatan Tuan Guru dalam politik praktis di Lombok menjadi, *pertama*, Tuan Guru yang politisi. Yaitu tuan guru yang memfokuskan kegiatannya kepada politik praktis. Kegiatan politiknya lebih dominan dibandingkan dengan memberikan pengajian kepada jama’ah atau kepada para santri. *Kedua*, Tuan Guru yang terlibat dalam politik, tetapi hanya menjadi pendulang suara (*vote gatter*). Tuan Guru ini menganggap dirinya tidak memiliki kapasitas politik, dalam arti politik praktis. Bahkan beberapa Tuan Guru yang sebagai pendulang suara agar mendapatkan bantuan untuk pesantren atau madrasahnyanya dari yang didukung. Melainkan lebih kepada pemberian pengajian kepada *jama’ah*. *Ketiga*, Tuan Guru yang tidak berpolitik. Tuan Guru yang memfungsikan agama untuk menjaga ketenangan batin, statis dan konservatif. Lebih berorientasi pada kehidupan

akhirat, serta tampak lebih tertutup oleh perubahan-perubahan dari luar termasuk dalam menentukan afiliasi politiknya.

Kata kunci: *Desentralisasi, tuan guru, politik*

A. PENDAHULUAN

Berakhirnya rezim Soeharto secara tiba-tiba pada tahun 1998 membuat *landscape* politik lokal di Indonesia berubah secara drastis.¹ Termasuk di dalamnya perubahan struktur politik, perubahan polarisasi dan kekuatan politik di dalam masyarakat Indonesia.² Bahkan, membuat Zainal Abidin Amir menyatakan bahwa politik Indonesia mengikuti pola politik Indonesia yang klasik seperti disampaikan oleh Geertz pada tahun 1950-an, yaitu Islam santri versus abangan dan priayi.³ Di tingkat daerah, kebebasan politik, demokrasi dan desentralisasi politik telah menjadi kekuatan politik dan gerak an sosial yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Lombok.⁴ Begitu juga dinamika politik lokal, telah memasuki babak baru, aktor, institusi, dan budaya politik yang bermunculan memainkan peran dalam tingkatan lokal bahkan aktor-aktor lokal yang memiliki simbol kultural lokal kembali dalam panggung politik.⁵ Serta menguatnya gejala politik identitas yang mewujud dalam rivalitas elit lokal sebagai kosekuensi dari demokrasi dan desentralisasi kekuasaan yang kemudian dilabelkan dengan reformasi.⁶

¹Taufiq Tanasaldy, *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan* (Leiden: KITLV, 2012), hlm.1.

²Edang Turmudi, "Demokrasi, Primordialisme dan Kekerasan Politik", dalam *Yang Pusat dan Yang Lokal: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal*, eds. Nick. T. Wiratmoko, Prajarta DS, dan Kutut Suwondo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 147.

³Pada tahun 1950-an, pemikiran politik serta ideologi atau aliran memainkan perannya pada saat itu. Harbert Feit dan Lance Castles mencatat bahwa pada awal-awal kemerdekaan 1962, Indonesia memiliki tiga aliran politik, Nasionalis, Islam, dan Marxisme. Pada tahun 1950-an, diklasifikasikan aliran pemikiran politik menjadi tiga aliran, yaitu : Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme. Lihat Harbert Feith dan Lance Castles (eds), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988), xxv-lix; Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto* (Jakarta : LP3ES, 2003), hlm. 7.

⁴Jeremy J. Kingsley, "Village Election, Violence and Islamic Leadership in Lombok, Eastern Indonesia." *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 27, no. 22 (2012), hlm. 285.

⁵Anis Baswedan, "Kata Pengantar" dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van 't Klinken, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, 2007), hlm. x-xi.

⁶Henk Schulte Nordholt, "Renegotiating Boundaries: Access, Agency, and Identity in post-Suharto Indonesia", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 159, No. 4 (2003), hlm. 551.

Desentralisasi adalah merupakan fenomena global dan lokal, yang di banyak Negara memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman Amerika Latin misalnya, tercatat bahwa desentralisasi telah menjadi “*champion*” dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintahannya, begitu juga bertambahnya partisipasi etnik dan kelompok sosial minoritas yang sebelumnya dikucilkan oleh pemerintahan authoritarian.⁷ Sejak 2001, Indonesia telah mengambil desentralisasi sebagai kerangka institusi pemerintahannya, yang oleh Vedi R. Hadiz menganggap sesuai atau cocok dengan Indonesai.⁸ Desentralisasi adalah salah satu kosekuensi dari kejatuhan rezim Soeharto yang memberikan babak baru dalam sejarah sosial politik di Indonesia, yang kemudian, menurut David Ray dan Gary Goodpaster, Indonesia akan menjadi lebih demokratis, transparan, dan lebih politik partisipatoris serta kekuasaan ekonomi lokal.⁹ Senada dengan itu, M. Ryaas Rasyid juga mengatakan bahwa dalam perspektif politik, desentralisasi merupakan fondasi yang fundamental dalam pembangunan demokrasi. *Pertama*, memberikan wewenang kepada legeslatif tingkat provinsi atau lokal (DPRD I dan II) untuk memilih dan meminta akuntabilitas pimpinan di daerah maupun di provinsi (Gubernur dan Bupati); menginisiasi dan meformulasikan undang-undang dan regulisanya; menyetujui bageting; dan membuat institusi baru. *Kedua*, kekuasaan ada di daerah, masyarakat lokal mendapat kesempatan besar dalam berpartisipasi membuat kebijakan dan menyediakan pelayanan bagi mereka. *Ketiga*, kosekuensi atas meningkatnya akuntabilitas publik, maka masyarakat harus menjamin kepentingannya yang nantinya tidak akan menjadi kekerasan.¹⁰

Nada pesimis pun muncul dengan mengatakan bahwa desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokratisasi, *good governance*, penguatan masyarakat sipil di tingkat daerah, malah seringkali desentralisasi menimbulkan korupsi, kolusi dan

⁷Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* (Singapore: ISEAS Publishing, 2011), hlm. 19.

⁸Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* (Singapore: ISEAS Publishing, 2011), hlm. 19.

⁹David Ray dan Gary Goodpaster “Indonesia Decentralization: Local Autonomy, Trade Barriers, and Discrimination,” in *Autonomy and Disintegration in Indonesia*, eds. Damien Kingsbury, and Herry Aveling (USA: Roudledge, 2012, ProQuest ebrary) hlm. 75.

¹⁰M. Ryaas Rasyid, “Regional Outonomy and Local Politics in Indonesia,” in *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, eds. Edward Aspinall and Greg Fealy (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2003), hlm. 64.

kekerasan politik yang dulu menjadi bagian dari rezim Orde Baru¹¹. Laporan International Crisis Group (ICG) 2010 menyebutkan bahwa desentralisasi menyebabkan kekerasan meningkat menjadi 20 kasus dari 244 dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) langsung, yang mana sebelumnya pada tahun 2005 sampai 2008 terdapat 13 kasus¹². Begitu juga banyak disaksikan dalam pengalaman desentralisasi, penyebaran korupsi, penyuapan dan sogokan.¹³ Serta tindak kekerasan politis yang sekarang dibangun dan dilembagakan dengan pola-pola patrimonial yang ada di tingkat daerah.¹⁴

Selama dekade terakhir, proses desentralisasi di Indonesia telah memberikan dampak pada pemberdayaan politik lokal di sebagian besar Indonesia, termasuk di Pulau Lombok.¹⁵ Pergeseran pola pemerintahan sentralistik menjadi desentralisasi ini pun memperlihatkan fenomena baru di Lombok, yaitu menguatnya gejala identitas, kekerasan komunal, dan rivalitas politik elit-elit lokal, yaitu Tuan Guru dan kaum *Menak*.¹⁶ Di beberapa daerah kondisi seperti ini penguatan terjadi, baik itu yang menguntungkan kaum *Menak*, maupun juga yang menguntungkan para Tuan Guru. Golongan *Tuan Guru* dan kaum *Menak*¹⁷ (bangsawan) adalah dua elit lokal yang

¹¹Henk Schulte Nordholt and Garry van Klinken, "Introduction" in *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*, eds. Henk Schulte Nordholt and Garry van Klinken (Leiden : KITLV Press, 2007), hlm. 18.

¹²Indonesia Crisis Group, *Indonesia: Preventing Violence in Local Elections*, Asian Raport, 2010

¹³Paul J. Carnegie, "Democratization and Decentralization in Post-Soeharto Indonesia: Understanding Transition Dynamis," *Pacific Affair, University of British Colombia*, (2008/2009), hlm. 516.

¹⁴Jeremy J. Kingsley, "Village Election, Violence and Islamic Leadership in Lombok, Eastern Indonesia," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* (2012), hlm. 286-309.

¹⁵Ibid, hlm. 285

¹⁶Irene Hiraswati, dkk, *Dinamika Peran Elit Lokal di Pedesaan Paca Orde Baru: Studi Kasus Pergeseran Peran Tuan Guru di Lombok Timur*, 7

¹⁷Islihat ini menjadi perdebatan di kalangan peneliti Barat, yaitu apakah *menak* itu berasal dari dari keturunan raja atau memang *menak* itu adalah kedudukan dalam administrasi. Seperti diulas oleh Heather Sutherland dalam *The Priyayi*, mengatakah bahwa Priyayi berasal dari kata *para yayi*, yang artinya adik (dari raja) atau keturunan raja-raja. Akan tetapi Robert van Niel tidak membenarkan hal tersebut karena menurutnya gelar tersebut menunjukkan martabat seseorang dengan "Raden Mas" atau yang lainnya yang berhubungan dengan kedudukannya dalam admistrasi tertentu bukan dihubungkan dengan garis keturunan leluhurnya. Dalam masyarakat Lombok, penggunaan istilah *menak* dalam penyebutan seseorang yang memiliki trah darah biru, yang ditandai dengan gelar di awal namanya, yaitu *Lalu* untuk laki-laki dan *Baiq* untuk perempuan. Kerena memang masyarakat Lombok memiliki stratifikasi sosial masyarakat yaitu, *pertama*, golongan *menak* tinggi. Yaitu golongan keluarga inti kerajaan yang disebut *Datu*. Dalam garis keturunannya digelari dengan *Raden* untuk laki-laki dan *Dende* untuk anak perempuan. *Kedua*, golongan *Menak* menengah atau *pruwangsa*, yaitu golongan ini timbul karena akibat perkawinan campuran antara *menak* tinggi dari laki-laki dan wanita dari golongan rendah. Gelarnya kemudian disebut dengan *Lalu* untuk laki-laki dan *Baiq* untuk perempuan. *Ketiga*, golongan *Jajarkarang*. Yaitu warga masyarakat biasa yang merdeka. Keempat, orang budak (*panjak*). Yaitu orang-orang yang menjadi tawanan perang. Tapi golongan ini pada masa sekarang sudah tidak ada. Lihat,

muncul ketika reformasi di Lombok. Kedua elit lokal ini memiliki basis simbol kultural yang berbeda-beda. Tuan Guru memiliki simbol kultural keagamaan, sedangkan kaum *Menak* berbasiskan simbol kultural budaya. Elit informal (*Tuan Guru*) memiliki kekuasaan berdasarkan kharisma dan tradisi.¹⁸ Seorang elit informal mendapatkannya melalui pengakuan atas masyarakat bukan prosedur pemilihan atau legal-formal. Biasanya elit informal ini memiliki karismatik yang dipercaya oleh masyarakat bahwa kekuasaan yang dimiliki sah adanya.¹⁹

Kaum *Menak* adalah mereka yang secara sosial politik berada di atas masyarakat kebanyakan, tidak saja dalam material akan tetapi dalam kedudukannya dalam sosial budaya.²⁰ Dalam sejarahnya kaum *menak* atau elit formal ini menduduki kepala wilayah sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan Belanda yang sampai pada masa kemerdekaan bentuk dan hukum masih digunakan.²¹ Lombok merupakan bagian wilayah yang masih menggunakannya. Kaum *menak* termanifestasikan dalam posisi sebagai bupati, anggota legislatif, kepala desa, pimpinan partai, yang kedudukan formal kekuasaannya berdasarkan hukum rasional-legal. Posisi dan tindakannya didukung oleh peraturan-peraturan formal sebagai legitimasi terhadap keberadaannya di masyarakat.²²

Pada masa Orde Lama, tahun 1950-an, pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik Muslim.²³ Sehingga memunculkan kesadaran politik Muslim di berbagai daerah, termasuk di dalamnya adalah Lombok. Tidak hanya itu saja, bahkan keragaman

Heather Sutherland, "The Priyayi", *Indonesia*, no. 19 (Apr., 1975), 57-77; Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia (terj)* (Bogor: Pustaka Jaya, 2009), 44; Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan; Artikulasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak* (Yogyakarta: Adab Press, 2006), 229-235;

¹⁸Lawan dari elit informal adalah elit formal, adalah seseorang yang dipilih melalui mekanisme Pemilu atau Pilkada. Elit formal ini misalnya menjadi gubernur, bupati, camat dan anggota dewan. Lihat Mariam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 15.

¹⁹Mariam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, 15

²⁰Nina Herlina Lubis, "Religious Thoughts and Practices of the Kaum Menak: Strengthening Traditional Power", *Studia Islamika*, 10, no. 2, (2003), hlm. 2.

²¹Nina Herlina Lubis, "Religious Thoughts and Practices of the Kaum Menak: Strengthening Traditional Power", hlm. 2.

²²Irene Hiraswati, dkk, *Dinamika Peran Elit Lokal di Pedesaan Pada Orde Baru: Studi Kasus Pergeseran Peran Tuan Guru di Lombok Timur*, dalam Ringkasan Laporan Penelitian Politik Lembaga Ilmu Politik (LIPI), (2010), hlm. 7

²³Tidak hanya partai politik muslim, akan tetapi pada masa itu adalah masa di mana pemikiran politik dan ideologi atau aliran menjadi hal yang sangat menonjol, sehingga memunculkan banyak partai dengan ideologi yang beragam. Pada masa itu diklasifikasikan aliran pemikiran politik menjadi lima aliran, yaitu : Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme Lihat Harbert Feit dan Lance Castles, (eds), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, (Singapore: Equinox Publishing, 2007), hlm. 12-13.

aliran ideologi politik pun berkembang, sehingga memunculkan konflik berdarah yang terjadi pada 1965.²⁴

Era reformasi, terjadi apa yang disebut dengan reformasi politik berlangsung dan membawa kosekuensi di berbagai belahan daerah Indonesia. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kosekuensi terhadap respon demokrasi dari kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 serta berdampak pada perubahan struktur administrasi pemerintahan sampai ke tingkatan desa, otoritas-otoritas daerah dan penegasan kembali kelompok budaya dan daerah.²⁵ Seperti yang terjadi di Lombok dan beberapa daerah lainya di Indonesia, reformasi terjadi, yang memberikan perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan elit politik lokal. Bagi orang Lombok, ini sangat penting, karena Lombok pernah dikuasai oleh orang lain selama 300 tahun. Mulai dari kekuasaan Bali pada tahun 1699 sampai akhirnya pada kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998.²⁶

Perubahan politik yang dibawa oleh reformasi tidak hanya berdampak positif, tetapi juga pada kompetisi pemimpin politik baru yaitu kaum agamawan dan *bangsawan (menak)*.²⁷ Karena sejak tahun 1800-an, Tuan Guru di Lombok didahului oleh para *bangsawan Sasak (menak)* yang menjadi pemimpin daerah tersebut. Selama periode kolonial Belanda di Lombok, Tuan Guru bekerja di luar struktur pemerintahan kolonial, kemudian mengembangkan institusi alternatif dan jaringan sosial yang masih bertahan sampai sekarang. Pada waktu yang sama kaum *menak* menjadi bagian dari pemerintahan kolonial. Pada saat sekarang ini peran Tuan Guru berlanjut sampai ke tataran masyarakat bawah (*grass roots*), bahkan pengaruh sosial-politik kaum *menak* mulai terkikis.²⁸

Dibandingkan dengan masa Orde Baru, Tuan Guru dijadikan sebagai “promotor pembangunan”, di mana berperan sebagai agen penyampai program pemerintah dan sekaligus sebagai aset partai politik ketika berlangsungnya ritual politik tahunan seperti

²⁴Misalnya apa yang terjadi pada bulan November 1965, sekelompok pemuda muslim di Lombok, didukung oleh militer membantai 11.000 penduduk Sasak yang komunis atau terlibat dalam program pembaharuan pertanahan dan kesejahteraan sosial yang dilakukan PKI pada 1960-an. Lihat Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, 2007, hlm. 378.

²⁵Chinthia L. Hunter, “Local Issues and Changes: The Post-New Order Situation in Rural Lombok”, *Sojoren: Jurnal of Social Issues in Southeast Asia*, 19, no. 1 (2004), hlm. 100

²⁶Jeremy J. Kingsley, “Peacemakers or Peace-Breakers? Provincial Elections and religious Leadership in Lombok, Indonesia”, *Indonesia*, no. 93, (April 2012), hlm. 57.

²⁷Ibid. hlm. 57.

²⁸Ibid, hlm. 64.

pemilu.²⁹ Akan tetapi era reformasi, Tuan Guru menjadi aktor dalam pemilu seperti mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkatan daerah maupun nasional, bahkan mencalonkan diri sebagai Gubernur.

Tuan Guru adalah seorang figur yang sangat penting di kalangan masyarakat Sasak, memiliki sosial kelas yang tinggi dan pemimpin agama yang berpengaruh luas terhadap social-politik.³⁰ Menurut Jeremy J. Kingsley, Tuan Guru memiliki otoritas yang beranekaragam, seperti menjadi pemimpin spiritual, pemimpin masyarakat, dan pemimpin politik. Kingsley juga mencatat banyak sarjana-sarjana Barat memberikan komentarnya terhadap Tuan Guru, seperti Sven Cederroth, dan Judith Ecklund. Sven Cederroth mengatakan bahwa Tuan Guru adalah seseorang yang diatas kebiasaan orang biasa. Dia dekat dengan Allah, karena itu, tidak dapat berbuat salah; sedangkan Ecklund menyatakan bahwa Tuan Guru itu memiliki status “*cult-like*” (kultus).³¹ Apa yang diputuskan dianggap merupakan titah dari Tuhan dan dikultuskan dengan cerita-cerita kehebatannya, seperti berada di banyak tempat dan lain-lain.

Pengaruh Tuan Guru yang begitu dominan dalam sosial-politik, yang memungkinkannya keterlibatan dalam politik praktis adalah sebuah keniscayaan. Keterlibatan Tuan Guru dalam politik praktis, menurut Imam Suprayogo, memberikan makna artikulasi, baik bersifat ekspresif dan instrumental.³² Artikulasi politik *Tuan Guru* bersifat ekspresif artinya apabila aktivitas yang dilakukan oleh Tuan Guru dengan melakukan eksploitasi atau memanipulasi simbol-simbol keagamaan serta penggalangan masa. Sedangkan instrumental adalah artikulasi politik yang menitik beratkan pada efektifitas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara langsung.³³ Azyumardi Azra menyarankan dalam keterlibatan Tuan Guru dalam politik mengambil kerangka *high politics*, politik moral yang independen, yang mengatasi *low politics* yang dalam praktiknya tidak jarang sesuai dengan ajaran Islam.³⁴

²⁹ Irine Hiraswari dkk, dalam Ringkasan Laporan Penelitian, *Dinamika Peran Elit Lokal di Pedesaan Pasca Orde Baru; Studi Kasus Peran Tuan Guru di Lombok Timur* oleh LIPI, hlm. 2.

³⁰ Jeremy J. Kingsley, “Village Elections, Violence, and Islamic Leadership in Lombok, Eastern Indonesia.”, *Sojourn: Jurnal of Social Issues in Southeast Asia*, 27, No. 2 (2012), hlm. 288.

³¹ Jeremy J. Kingsley, “Peacemakers or Peace-Breakers? Provincial Elections and religious Leadership in Lombok, Indonesia”, *Indonesia*, No. 93, (April 2012), hlm. 62-63.

³² Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kyiai*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 47.

³³ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kyiai*, hlm. 47

³⁴ Azyumardi Azra, *Islam dan Reformasi; Dinamika Intelektual dan Gerakan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 44.

B. POLITIK TUAN GURU ERA REFORMASI DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Keterlibatan Tuan Guru dalam politik pada era reformasi bisa dilihat dari cara pandangan Tuan Guru tentang politik. Pandangan Tuan Guru dalam politik bisa dilihat dalam dua hal. *Pertama*, pemahaman Tuan Guru tentang hubungan antara Islam dan Politik. Kedua, berkaitan dengan sikap Tuan Guru terhadap format politik yang ada.³⁵ Dalam hal ini Tuan Guru memandang hubungan Islam dan Politik sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.³⁶ Ini sesuai dengan pandangan yang pertama, bahwa Islam tidak hanya mengurus soal *ukhrawi* saja akan tetapi juga mengurus urusan keduniaan.

Keterlibatan Tuan Guru juga berkaitan sikapnya terhadap format politik yang ada. Terlihat bahwa Tuan Guru meyakini sistem format politik yang ada ini, sudah cukup baik.³⁷ Ini bisa dilihat dari keaktifan Tuan Guru dalam keterlibatannya dalam politik yang ada dan mencalonkan dirinya sebagai calon, baik di legislatif maupun di eksekutif.

Apa yang dipaparkan sebelumnya bahwa keterlibatan Tuan Guru dalam politik, yang salah satunya melalui Pemilukada, ada dua argumentasi. *Pertama*, karena pemahaman Tuan Guru tentang hubungan Islam dan Politik, yaitu Islam bersifat integralistik, tidak ada pemisahan antara Islam dan politik. *Kedua*, Tuan Guru menyakini bahwa format politik yang sudah ada ini cukup baik. Terbukti dengan keterlibatan para Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan memenangkannya pada Pemilukada NTB 2008. Atau Tuan Guru Najmu Akhyar yang mencalonkan diri menjadi calon Bupati di Pemilukada Lombok Utara pada 2015 dan memenangkannya.

Pengamatan peneliti bahwa politik yang dimainkan oleh Tuan Guru sama seperti praktik politik yang diperankan oleh para politisi lainnya. Misalnya kampanye, memiliki

³⁵Ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asfar dalam meneliti pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai di dua lingkungan pesantren di Jawa Timur, yaitu di Jombang, Pesantren Bahrul Ulum dan Pesantren Darul Ulum. Walaupun sebenarnya penelitian ini dilakukan pada tahun 1999, peneliti beranggapan bahwa teori yang dikemukakan relevan dengan kondisi di daerah peneliti. Lihat Muhammad Asfar, *Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai*, Prisma, N0. 5 Tahun XXIV Mei 1995, hlm. 32-34.

³⁶Wawancara dengan TGH Yusuf Ma'mun, Amidul Ma'had Darul Qur'an wal Hadis (MDQH) NW Pancor pada tanggal 8 September 2015; TGH Najmul Ahyar; TGH. Nasrullah, Bupati Lombok Utara, pada tanggal 21 September 2015.

³⁷Wawancara dengan Bapak Khairul Rizal, Ketua DPRD Lombok Timur, pada 14 September 2015.

program-program untuk kesejahteraan rakyat, mensosialisasikan diri mereka untuk dipilih sebagai anggota dewan dan lainnya. Akan tetapi, ada satu hal yang membedakannya dengan politik yang non Tuan Guru atau *Menak*, yaitu kekuatan atau simbol-simbol agama. Kekuatan agama mendominasi karakter Tuan Guru, karena Tuan Guru adalah publik figur masyarakat yang memiliki kedalaman ilmu, terutama ilmu agama, yang kemudian diajarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mempercayakan pilihan politiknya kepada mereka. Serta apa yang dilakukan oleh Tuan Guru dalam politik merupakan bagian dari dakwah Islamiyah, sebagai bentuk menegaskan *amar makruf nahi mungkar*.³⁸ Tidak mengherankan nanti dalam kampanye mereka menggunakan ruang publik agama, atau majelis-majelis ta'lim atau pengajian-pengajian agama mingguan yang rutin dilakukan. Dengan memberikan himbauan dan memerintahkan kepada jama'ahnya untuk memilih Tuan Guru yang dicalonkan dalam calon legislatif maupun eksekutif.³⁹ Di samping itu juga, Tuan Guru berhasil mengelola dan mentransformasikan sosial kapital dan spiritual kapital yang dimilikinya menjadi politik kapital atau modal politik untuk mencapai kekuasaan.⁴⁰

1. TGH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI

TGH Muhammad Zainul Majdi lahir di Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 31 Mei 1972. Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi atau lebih dikenal dengan Tuan Guru “Bajang” adalah putra ke tiga dari Hj. Siti Rahun dan H. M. Jalaluddin. Merupakan salah satu cucu dari pendiri Nahdlatul Wathan, Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (1904-1997), Tuan Guru “Bajang” lahir dan dibesarkan dalam kondisi lingkungan religius, tentu saja berpengaruh besar terhadap perkembangan pemikirannya yang kemudian dianggap mewarisi bakat kakeknya, sebagai Ulama dan sekaligus politisi.

Zainul Majdi tidak lepas dari pesantren. Pendidikan menengah yang ditempuh di Pondok Pesantren Darul Nahdlatul Wathan pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1995, beliau mendapatkan gelar serjana S1 (Lc) di Jurusan Tafsir Hadits dan Ilmu

³⁸Wawancara dengan TGH Gunawan, pendiri pesantren Dhiaul Fikri di Sakra pada tanggal 9 September 2015.

³⁹Majlis taklim atau pengajian yang peneliti hadiri, tidak hanya tentang ceramah agama tetapi juga tentang politik, terkait tentang siapa yang harus dipilih dalam Pemilu.

⁴⁰Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: KSS Yogyakarta, 2014), hlm. 7.

Al-Qur'an Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kemudian menyelesaikan Program Pasca Sarjana di Jurusan yang sama di Universitas Al-Azhar pada tahun 1999.⁴¹ Dan meraih gelar doktor di tempat yang sama juga pada tahun 2010.

Latar belakang pemikirannya tidak lepas dari latar belakang dari pesantren. Baginya, politik itu adalah sarana, media, wasilah, media perjuangan, wasilatul ijtihad.⁴² Oleh karena itu, dalam pemikiran politiknya, Majdi mengatakan bahwa politik dan agama adalah dua saudara kembar atau dua sisi dari mata uang. Seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, lanjut Majdi, agama dan negara (*daulah*) adalah dua saudara kembar, di mana agama adalah pondasi sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi akan runtuh, adapun ada yang menganggap agama dan politik itu terpisah, bukanlah pendapat yang *shahih* atau *muktabarah* (*credible*). Dan penolakan politik Islam jelas bukan merujuk pada norma dan pengalaman sejarah umat Islam, melainkan lebih merujuk pada norma dan sejarah masyarakat Eropa.⁴³

Awal karirnya menjadi politisi pada tahun 2004 yaitu menjadi anggota DPR RI mewakili daerah NTB melalui PBB atas permintaan Yusril Ihza Mahendra.⁴⁴ Kemudian atas dialog yang dilakukan oleh dan restu dewan *Syura* PBB, Majdi berani mencalonkan diri sebagai Gubernur NTB pada tahun 2008. Pada tahun 2008, Pemilihan Gubernur secara langsung pertama kali di NTB. Zainul Majdi mencalonkan diri sebagai kandidat calon Gubernur dipasangkan dengan Badrul Munis, seorang birokrasi yang berpengalaman. Majdi adalah seorang Tuan Guru tersohor di Lombok. Dia populer disebut dengan Tuan Guru Bajang, karena relatif masih muda dan dia nyaman dengan reputasi itu di kalangan masyarakat Sasak. Dia dianggap sebagai pewaris karismatik kakeknya, TGKH. Zainuddin Abdul Majdid. Memperoleh gelar doktoralnya dalam studi tafsir di Al-Azhar, Cairo, sehingga Majdi populer memiliki pengetahuan yang luas, dihormati di kalangan masyarakat Sasak. Di samping itu, dia terlibat dalam diskusi-

⁴¹Zulkarnain, *Tuan Guru Bajang; Berpolitik dengan Dakwah dan Berdakwah dengan Politik* (Surabaya: Penerbit Kaisamedia, 2009), hlm. 1-2.

⁴²Wawancara dengan Zunnurain, Komisioner KPUD Lombok Timur pada 7 September 2015.

⁴³TGH. Zainul Majdi, dalam "Pengantar", *Tuan Guru Bajang; Berpolitik dengan Dakwah dan Berdakwah dengan Politik* (Jawa Timur: Penerbit Kaisamedia, 2009), hlm. vi.

⁴⁴Kedekatan Yusril dengan Tuan Guru "Bajang" adalah karena pada masa lalu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majdid (kakeknya) mempunyai kedekatan yang erat dengan Masyumi. Oleh karena itu, Tuan Guru "Bajang" sekarang menyambungkan hubungan silaturahmi itu.

diskusi keagamaan dan aktivitas pengajian di kampung pedesaan Lombok. Dia juga mengeksplorasi ide-ide kontemporer, isu-isu modernitas dan pembangunan masyarakat.⁴⁵

Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi, adalah seseorang yang tumbuh di lingkungan NW, namun Majdi tidak hanya berhadapan dengan jama'ah NW saja, akan tetapi juga jama'ah-jama'ah lain yang berafiliasi ke NU dan Muhammadiyah. Majdi juga melakukan dakwah ke luar pulau Lombok, seperti Pulau Sumbawa. Dalam ceramah-ceramahnya, Majdi menekankan dibutuhkan hubungan yang harmonis antara kelompok agama yang berbeda-beda di Lombok. Bukannya menyebar kebencian dan memunculkan sintemen antar agama.⁴⁶ Majdi mengatakan bahwa nilai-nilai Islam universal dapat mempertahankan perdamaian dan saling tolong-menolong.⁴⁷ Oleh karenanya dengan reputasi Tuan Guru yang demikian dan memiliki pikiran terbuka membuatnya banyak diikuti oleh tuan guru-tuan guru lainnya. Sebagian besar masyarakat Sasak mengatakan bahwa Majdi adalah tipe Tuan Guru yang ideal pada masa kontemporer di Lombok. Majdi tidak hanya memiliki pribadi karismatik, akan tetapi juga memiliki otoritas keagamaan tinggi.

Pada Pemilu Gubernur pada tahun 2008, Majdi telah memiliki sumber sosial dan keagamaan sebagaimana yang telah disebutkan. Ada empat kandidat yang ikut bertarung dalam Pemilu tersebut, sebagian besar mereka adalah mantan birokrasi yang berpengalaman dan juga politisi, hanya Majdi kandidat dari kalangan pemimpin agama. Majdi dan Badrul Munir mendapat dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di samping itu, banyak yang meragukan Majdi sebagai calon gubernur. Dikarenakan kapasitas kepemimpinan yang minim, umur yang masih muda dan minim dengan pengalaman. Ditambah dengan perdebatan seorang pemimpin agama yang terlibat dalam politik praktis yang nantinya bisa mencerdai ketuaguruannya dalam kotornya politik. Akan tetapi dengan *track record* dan dari golongan muda, pemikiran terbuka, dan tuan guru yang toleran, sangat diperhitungkan oleh sebagian kalangan masyarakat Sasak. Reputasinya ini dibangun sejak lama sebelum Pemilu diadakan. Ditambah, dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya, Majdi relatif lebih bersih dan memiliki integritas personal. Sedangkan lawan-lawannya dihadapkan pada persoalan-persoalan keterlibatan korupsi. Faktor lain

⁴⁵Koran Republika, Selasa 9 Februari 2016.

⁴⁶Ibid. 2016.

⁴⁷Koran Republika, *Zainul Majdi Kembali Pimpin Nahdlatul Wathan*, Rabu 10 Agustus 2016.

yang menjelaskan kemenangan Majdi adalah berkerja mesin politik dengan baik. Dengan sumber agama dan politik, Majdi memenangkan pemilihan Gubernur NTB pada 2008.⁴⁸

Bagi peneliti, kemenangan Tuan Guru “Bajang” dalam Pelimukada adalah merupakan sebuah keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai sosial kapital dan spiritual yang dimilikinya menjadi politik kapital atau modal politik untuk mencapai kekuasaan.⁴⁹ Tuan Guru “Bajang” seorang pemimpin organisasi Islam kemasyarakatan yang terbesar di Pulau Lombok, yaitu NW. NW memiliki ribuan pesantren yang tersebar di seluruh pelosok pulau Lombok. Tak ayal, pengajian-pengajian yang dilakukan rutin dilakukan di berbagai tempat. Pengajian yang dilakukan bisa dua atau tiga kali dilakukan dengan daerah yang berbeda-beda. Kemudian didukung dengan sosok yang alim, seorang keturunan dari cucu pendiri Ormas Islam yang terbesar di NTB, NW, dan sekaligus ulama yang disegani di Nusantara, Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Serta beliau berasal dari keluarga yang berada yang memiliki tanah, pesantren, madrasah-madrasah dan bahkan sampai perguruan tinggi.

Kemenangan Tuan Guru “Bajang” juga menjadi inspirasi bagi Tuan Guru lain dan kader-kader NW lainnya dalam memasuki ranah politik praktis, baik yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau Bupati.⁵⁰

Itu sebabnya, pemimpin agama atau Tuan Guru tidaklah bisa diabaikan dalam persoalan-persoalan sosial politik dan agama.⁵¹ Para Tuan Guru tidak hanya berperan sebagai “*cultural broker*” di bidang kebudayaan, akan tetapi dalam perkembangannya, mereka memainkan peran yang signifikan sebagai pemimpin-pemimpin politik.⁵² Peran Tuan Guru tidak bisa diabaikan dalam persoalan sosial-politik dan agama. Bahkan dalam masyarakat Sasak, terbangun bahasa yang mengidentikkan Islam menjadi bagian yang penting dalam masyarakat Sasak. Sebagai contoh bahwa ada sebuah penyebutan

⁴⁸Ihsan Hamid, *Perilaku Politik Nahdlatul Wathan: Dari Pesantren ke Konflik Elit* (Jakarta: Impresa, 2013), hlm. 141.

⁴⁹Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: KSS Yogyakarta, 2014), hlm.viii.

⁵⁰Ibid, hlm.v.

⁵¹Jeremy J. Kingsley, “Village Elections, Violence, and Islamic Leadership in Lombok, Eastern Indonesia.” *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 27 (2012), hlm. 288.

⁵²Clifford Geertz, “The Javanese Kijai: The Changing Role of A Cultural Broker.” *Comparative Studies in Society and History*, 2 (1960), hlm. 247

khusus yang dialamatkan ketika seseorang yang sudah menunaikan ibadah haji.⁵³ Pak Haji atau Pak Tuan adalah sebutan diberikan ketika seseorang sudah menunaikan ibadah haji dan dianggap orang yang pantas dalam memimpin doa atau perayaan agama lainnya.

Rosyadi Sayuti menjelaskan bahwa pada waktu itu, Tuan Guru “Bajang” merupakan peristiwa fenomenal, karena calon Gubernur yang berasal dari kalangan Tuan Guru, cerdas, *shaleh*, tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Sehingga dalam keseharian di pemerintahannya, ketuan guruannya selalu dibawa ke mana-mana. Tidak pernah melepaskan ketuan guruannya, tanpa menurunkan citra dirinya sebagai Gubernur. Beliau adalah sebagai Tuan Guru, Gubernur, *umara* dan ulama sekaligus. Dalam kepribadian beliau, dia tidak pernah mau terlibat dalam hal yang tidak Islami atau diundang oleh agama lain yang sifatnya ritual, beliau tidak akan menghadirinya dan hal ini terlihat dalam kesahariannya yang sangat Islami.⁵⁴

Pada Pemilu 2013, Majdi terpilih untuk yang kedua kalinya. Sepanjang sejarah pemilihan Gubernur secara langsung, kemenangan petahana di NTB baru pertama kalinya. Majdi merupakan figur petahana yang menjadi representasi politik kaum muda dan juga agamawan yang terkenal di NTB. Hal ini karena dukungan NW sebagai organisasi non-politik juga diklaim sebagai salah satu mesin politik yang bekerja maksimal untuk kemenangan Majdi. Selain itu, dukungan gabungan partai politik besar di Indonesia, seperti Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PKB, PPP, dan Gerindra sangat membantu sebagai pendulang suara sang petahana.

2. TGH. NAJMUL AKHYAR

Najmul Akhyar adalah seorang Bupati Lombok Utara yang terpilih pada Pemilu 2015. Sebelumnya beliau adalah Wakil Bupati Lombok Utara. Akhyar adalah seorang juru dakwah dan politisi. Masyarakat Lombok Utara mengenalnya sebagai seorang Tuan Guru yang sederhana, yang melakukan dakwah keliling di seluruh daerah Lombok Utara. Biasanya pengajian dilakukan mulai pada pagi hingga bisa larut malam.

Diawali dari menimba ilmu di madrasah Nahdlatul Wathan, sampai aktif di lembaga dakwah kampus. Bahkan di awal karirnya menjadi anggota dewan daerah

⁵³Jeremy J. Kingsly, “Village Elections, Violence, and Islamic Leadership in Lombok, East Indonesia,” hlm. 288.

⁵⁴Wawancara dengan Rosyadi Sayuti, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB pada 17 September 2015.

(DPRD) Lombok Barat dua periode, yaitu pada tahun 1999-2004, dan 2004-2009, yang pada waktu itu Akhyar masih sangat muda, dan baru saja menyelesaikan sarjana hukumnya di Universitas Mataram (Unram).

Najmul Akhyar adalah sosok pemimpin agama, Tuan Guru yang sederhana, memiliki pesantren Hidayaturrahman NW di sekitar rumahnya serta memiliki pergaulan dengan masyarakat bawah dengan baik, yang membuat dirinya tidak ada sekat antara jama'ahnya. Kesan itu yang peneliti dapatkan ketika bertamu untuk mewawancarainya. Di kediamannya, atau *gedeng*, di depan ruang tamu, sudah menunggu beberapa kelompok masyarakat yang sudah menunggu kedatangannya pulang dari pengajian agama sekaligus berkampanye untuk pemilihan Bupati Lombok Utara pada Pemilu pada Desember 2015.

Baginya, politik adalah cara dalam rangka mengelola suatu Negara. Politik bebas nilai. Dalam arti jika orang memanfaatkan politik dengan baik, maka sangat memberikan manfaat. Begitu juga sebaliknya kalau dikelola dengan tidak baik sangat cepat memberikan kemudharatan.⁵⁵ Kemudian dia mengumpamakan dirinya ketika menjadi pembicara di seminar, mengatakan seseorang yang mempunyai akses untuk membuat undang-undang, kalau berniat jahat, sungguh luar biasa, kejahatan itu berdampak pada 250.000 lebih jiwa seseorang. Kemudian kalau berniat baik, maka akan menyelamatkan lebih dari 250.000 orang. Sehingga orang yang berniat baik, membuat aturan baik sesungguhnya berjihad itu dan Politik artinya berjihad.⁵⁶

Keterlibatnya dalam dunia politik dikarenakan ingin melakukan perbaikan.⁵⁷ Bahwa memilih orang baik untuk menduduki jabatan publik, memiliki perjuangan yang sangat mulia, kata Akhyar. Ini berarti bahwa masyarakat diandaikan tidak terpengaruh oleh uang karena melihat seseorang itu baik. Tujuan saya karena memiliki kemaslahatan sangat besar.

Najmul menjelaskan bahwa dia menerima demokrasi sebagai sebuah sistem yang mau tidak mau harus diambil. Akan tetapi, menurutnya konsep-konsep agama dalam musyawarah dikedepankan dahulu, sebelum mengedepankan demokrasi.⁵⁸

⁵⁵Wawancara dengan TGH. Najmul Akhyar, adalah Bupati Lombok Utara, pada 21 September 2015.

⁵⁶Wawancara dengan TGH. Najmul Akhyar, adalah Bupati Lombok Utara pada 21 September 2015.

⁵⁷ Ibid. 2015.

⁵⁸ Ibid. 2015.

Baginya demokrasi jika dibenturkan dengan nilai-nilai Islam, di satu sisi ada benarnya, di sisi lain ada salahnya. Ada benarnya karena suara terbanyak itu merefleksikan pikiran-pikiran baik dari banyak orang. Sebaliknya jika suara terbanyak itu sebagai alat untuk kekuasaan, maka dia akan menjadi salah. Demokrasi, sebenarnya ketika musyawarah itu tidak tercapai, kalau kita tidak mendapat terbaik dari yang terbaik. Tapi kecendrungan kita ingin pendapat kita harus diterima, dan mematikan keinginan orang lain, jelasnya.

Perilaku politisi agamawan, akan meminimalisir kerusakan kemaslahatan bangsa. Berbeda dengan politisi yang tidak agamawan kadang-kadang larut dalam korupsi.⁵⁹ Politik itu adalah *dakwah bil hal* kita, kata Akhyar. Seorang pimpinan yang baik bisa memberi tauladan. Contoh seandainya semua bupati, walikota, mau mengaktifkan dirinya shalat berjama'ah, ketika azan terdengar, maka akan menjadi sebuah system.⁶⁰ Itu dipraktikkan ketika jabatan Najmul sebagai wakil bupati, ketika azan berkumandang, kemudian Akhyar langsung datang ke masjid, shalat berjamaah. Hal itu dilakukan setiap hari. Sehingga mereka menjelang azan, mereka akan tahu dan siap-siap akan datang ke masjid shalat berjamaah.

Bagi peneliti, Akhyar bukanlah seorang politisi, yang pada awalnya memiliki *background* aktifis dakwah sejak beliau duduk menjadi mahasiswa. Pernah menjadi dosen hukum di Universitas Mataram. Kemudian dia terjun ke dunia politik dan menjadi Anggota Dewan selama dua periode, 1999-2004, dan 2004-2009.

Sempat berpindah-pindah partai politik karena ideologis dan kondisi situasi sosial politik pada waktu itu. Akan tetapi, tetap memilih politik yang berasaskan Islam. Kalau tidak, partai yang membawa nilai-nilai Islam.⁶¹

Kesahariannya, menurut pengamatan penelitian tetap menjadi seorang juru dakwah atau Tuan Guru. Dan masih aktif memberikan pengajian-pengajian agama di sekitar Lombok Utara.

Akhyar meyakini Islam itu *din dunya dan daulah*, terintegrasi. Tidak terpisahkan antara Islam dan Negara. Sehingga dia menjadi politisi juga berkaitan

⁵⁹ Ibid. 2015.

⁶⁰ Ibid. 2015.

⁶¹ Wawancara dengan TGH. Najmul Akhyar, adalah Bupati Lombok Utara pada 21 September 2015.

dengan pemahamannya politik Islam yang diyakini. Dan menjadikan politik sebagai ladang jihad, yang merupakan bentuk *dakwah bil hal* untuk kemaslahatan ummat.

Kemenangannya dalam Pemilu 2013 dengan memperoleh suara 68.326 suara atau 53,50%, sedangkan rivalnya mendapatkan 59.511 suara atau 46,50%. Itu memberikan gambaran bahwa pengaruh sebagai Tuan Guru dan menjadi pimpinan pondok pesantren menjadi sumber modal, baik itu sosial atau pun politik. Ditambah dengan beliau adalah kader NW, pengurus daerah NW Lombok Utara. Memperkuat legitimasinya sebagai sorang tokoh agawan.

Sempat menarik perhatian ketika Akhyar, merupakan kader partai Gerindra, tidak sejalan dengan ketua PB NW, Tuan Guru “Bajang”, karena merupakan kader muda dari NW yang berafiliasi dengan Partai Demokrat. Malah partai Demokrat mendukung rival dari Akhyar dalam Pemilu 2013 di Lombok Utara. Akan tetapi, dengan menggunakan pendekatan kultural antara kader NW dengan pimpinan organisasi NW, Akhyar mendapatkan dukungan dari jama’ah NW di Lombok Utara. Dan memenangkan pertarungan.

3. TGH. MAHALLI FIKRI

Tuan Guru seperti juga peran Kiai yang ada di Jawa, secara normatif memiliki peran yang penting, yaitu dalam membimbing agama dan spiritual masyarakat melalui majlis-majlis ta’lim atau pengajian, lembaga pendidikan formal dan informal seperti pesantren dan madrasah, peran ini akan berubah-ubah sesuai dengan sosial-politik yang berkembang di Masyarakat.⁶²

Tuan Guru Mahalli Fikri adalah selain menjadi pimpinan pondok pesantren Al-Kamal, juga seorang politisi yang sekarang menduduki wakil ketua DPRD NTB dan juga sebagai wakil ketua DPD NTB Partai Demokrat.

Diawali dengan mengenyam pendidikan di pesantren NW, Pancor, kemudian melanjutkan sekolahnya ke Mekkah, Shaulatiyah. Setelah kembali dari pendidikannya di Shaulatiyah, sebagaimana layaknya seseorang yang pulang dari Timur Tengah, dia diamanahkan menjadi pimpinan pondok pesantren Nurul Haramain, NW Narmada, Lombok Barat. Tuan Guru Mahalli Fikri, dikenal sebagai sosok yang ‘nyentrik’, Tuan

⁶²Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: KSS Yogyakarta, 2014), hlm. 171.

Guru yang tidak biasa pada umumnya. Suka bermain tenis, pergaulan luas dari anak muda sampai pejabat, yang kemudian berselang waktu, dipercaya menjabat sebagai ketua KPUD Provinsi NTB tahun 2004-2009. Sejak itu, karir politiknya mulai terbangun dan menanjak serta sekarang menjadi politisi Partai Demokrat NTB periode 2014-2019.

Sebagian besar populasi masyarakat Sasak adalah Muslim, Tuan Guru menjadi figur sosial keagamaan yang sangat penting sekali. Dan mereka tidaklah merupakan kelompok yang homogen, akan tetapi beragam posisi keagamaannya, afiliasi politiknya dan memiliki pengaruh yang bervariasi.⁶³ Tuan Guru Mahalli Fikri mendapatkan pengakuan dari masyarakat Sasak terhadap ketuan guruannya yang menjadikannya mendapatkan legitimasi keagamaan. Dan kemudian seiring waktu merambah serta mendominasi yang menjadikannya mendapatkan legitimasi sosial politik. Bisa dikatakan adanya pergeseran atau bahkan penggabungan otoritas keagamaan dan sosial politik.

C. PERILAKU DAN TIPOLOGI POLITIK TUAN GURU

Tidak sedikit dari perilaku politik Tuan Guru dalam arena politik memberikan dampak yang negatif terhadapnya, misalnya kehilangan jama'ah atau berkurangnya karisma yang dimilikinya karena sudah berkurangnya intensitas pengajian terhadap umat. Mukhlis menjelaskan bahwa Tuan Guru belum bisa mewarnai perpolitikan yang ada di Lombok dan NTB umumnya, bahkan terseret dalam politik yang dimainkan oleh lawan politiknya. Ketika Tuan Guru berpolitik, maka karismanya akan berkurang di depan jama'ahnya karena ada ruang sosial yang kosong yang ditinggalkan oleh Tuan guru.⁶⁴ Dengan keterlibatan Tuan Guru dalam politik, lanjutnya, maka ada ruang kosong yang ditinggalkan, untuk urusan-urusan lain ketimbang ke umat. Ditambah situasi politik yang sangat kompetitif, maka kesakralan karismatikanya menjadi berkurang.⁶⁵

⁶³Jaremy J. Kingsley, "Peacemakers or Peace-Breakers? Provincial Elections and Religious Leadership in Lombok, Indonesia." *Indonesia*, 93 (2012), hlm. 62.

⁶⁴Wawancara dengan Mukhlis, Ketua Ikatan Alumni PMII Lombok dan kader muda NU pada tanggal 20 September 2015.

⁶⁵Ibid. 2015.

Menurut pengamatannya, perilaku politik Tuan Guru memberikan unsur-unsur agama dalam partai politik, sehingga seringkali perilaku politik Tuan Guru mengatasnamakan agama. Karena pada faktanya agama dijadikan sebagai basis politik, yang dimanfaatkan. Tidak diragukan lagi, banyak peraturan-peraturan lahir berdasarkan agama, seperti peraturan daerah (Perda) maksiat, Perda minuman keras, akan tetapi, tidak begitu efektif.⁶⁶

Senada dengan Mukhlis, Saiful Fikri, melihat bahwa Tuan Guru terlibat dalam politik sangat disayangkan.⁶⁷ Hal tersebut disebabkan karena turunnya intensitas Tuan Guru ke jama'ah, berkurangnya dalam memberikan pengajian. Karena pada dasarnya masing-masing Tuan Guru yang terlibat dalam politik memiliki majlis-majlis taklim, yang sebelumnya majelis-majelis taklim seringkali bisa diisi di setiap minggu, kemudian kerkadang dia tidak bisa terisi karena jadwal reses dan sebagainya.⁶⁸ Menurut Fikri, citra Tuan Guru dalam politik terkesan negatif. Karena pada awalnya Tuan Guru memiliki citra yang bagus, netral, akan tetapi kemudian ketika masuk politik, *image* itu berubah dalam masyarakat ketika menjadi anggota dewan, misalnya citra diri yang akan banyak uang, ketika dia dimintai sumbangan, dia menolak. Ketika dia menolak, maka stigmanya negatif dan itu fakta yang terjadi di Lombok.⁶⁹ Baginya, ada beberapa Tuan Guru yang pada periode pertama di pemilihan legislatif ia mendapat kursi, tapi di periode ke dua dia gagal. Ini karena dia tidak bisa menjaga konstituen. Perilaku politik yang dilakukan sebagai tuan guru sekaligus anggota dewan tidak mampu memberdayakan konstituen. Yang kemudian berdampak terhadap organisasi, jama'ah menjadi trauma terhadap politik terutama terhadap Tuan Guru.⁷⁰

Kekhawatiran pun muncul ketika transformasi Tuan Guru menjadi politisi. *Pertama*, akan berkurangnya orang-orang yang peduli, lebih-lebih pemimpin agama yang mendudukan dirinya di tengah-tengah antara rakyat dan penguasa. Akan berkurangnya orang-orang yang secara adil dan seimbang apabila terjadi konflik antara warga bangsa ini. *Kedua*, menjadi politisi lebih menguntungkan, karena menjadi politisi akan mudah memperjuangkan moralitas dan idelitas. Padahal praktik politik kita bukan

⁶⁶ Ibid. 2015.

⁶⁷ Wawancara dengan Saiful Fikri, adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH NW) pada tanggal 7 September 2015.

⁶⁸ Ibid. 2015.

⁶⁹ Ibid. 2015.

⁷⁰ Ibid. 2015.

sarana efektif dalam memperjuangkan idealitas dan moralitas. Serta takut akan banyaknya kehilangan kharisma dan otoritas moral.⁷¹

Dengan demikian ketika seorang Tuan Guru aktif berpartai politik tertentu, dan menjadi bagian dari pengurus, atau menjadi anggota dewan, maka otomatis, majlis-majlis taklim di bawah kurang mendapatkan perhatian. Peran Tuan Guru dalam mengajarkan agama sudah tidak signifikan lagi. Karena sudah tidak lagi independen, tidak lagi menjadi otonom, tidak lagi milik rakyat secara umum.

Keterlibatan Tuan Guru dalam politik menjelaskan adanya polarisasi yang terjadi di kalangan Tuan Guru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imam Suprayogo, memperlihatkan bahwa tipologi Tuan Guru dengan pertama Tuan Guru politik, Tuan Guru netral dan Tuan Guru yang tidak berpolitik.⁷² *Pertama*, Tuan Guru politik adalah Tuan Guru yang terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Termasuk dalam kategori ini menurut Suprayogo, yaitu menempatkan dirinya dekat dengan partai politik atau pemerintah. *Kedua*, Tuan Guru yang mengambil jarak, baik itu dengan pemerintah maupun partai politik, yang kemudian disebut oleh Suprayogo dengan Tuan Guru netral. *Ketiga*, yaitu Tuan Guru yang berkonsentrasi pada kehidupan spiritual dan memberikan pengajaran agama di pesantren. Dan ini menjadi mayoritas di pedesaan.⁷³ Akan tetapi dalam perkembangannya, polarisasi ini berubah menjadi, *pertama*, Tuan Guru spiritual. Tuan Guru yang menekankan upayanya kepada pendekatan diri kepada Tuhan melalui amal ibadah. *Kedua*, Tuan Guru Advokatif, Tuan Guru yang tidak hanya aktif mengajarkan para santri dan masyarakat dalam pengajaran agama, dan juga memperhatikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan mencari solusinya. *Ketiga*, Tuan Guru politik adaptif, yaitu Tuan Guru yang bisa menyesuaikan diri dengan kekuatan dominan. Dan terakhir, Tuan Guru mitra kritis, yaitu Tuan Guru yang berani mengambil sikap kritis walaupun tidak berposisi.⁷⁴

Tipologi yang diberikan oleh Suprayogo cukup membantu menjelaskan keterlibatan Tuan Guru dalam politik praktis di Lombok. Setidaknya juga bisa memberikan penjelasan bahwa keterlibatan Tuan Guru dalam politik praktis memiliki

⁷¹Komarudin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama: Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), 11-13.

⁷²Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 50.

⁷³Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, hlm. 50.

⁷⁴Ibid, hlm. 123-124.

beberapa tipologi. *Pertama*, ada Tuan Guru yang berpolitik, menjadi Tuan Guru politisi, *kedua*, ada Tuan Guru yang berpolitik tapi hanya ingin menjadi juru kampanye, pengumpul suara (*vote getter*), tidak mau ikut berkontestasi dalam pemilu, karena menganggap dirinya tidak memiliki kapasitas untuk berpolitik praktis, *ketiga*, ada tuan guru tidak mau berpolitik.

Tuan Guru politisi adalah Tuan Guru yang selain pimpinan pondok pesantren, beliau juga senantiasa peduli pada organisasi politik dan juga pada kekuasaan. Secara umum Tuan Guru menyatakan bahwa politik itu baik dan harus diperjuangkan selama orientasinya pada kemaslahatan umat dan kemajuan agama dan bangsa.⁷⁵ Pemikiran tersebut didasarkan kepada adanya hubungan mutualistik agama dan politik. Ini terlihat sejak tahun 1970-an, yang mana awalnya berpandangan secara konvensional yang melihat hubungan agama dan politik secara *integrated*, namun sekarang sudah melihat hubungan agama dan politik secara *symbiosis mutualisme*.⁷⁶

Tipologi Tuan Guru yang kedua, bahwa secara umum sama seperti Tuan Guru pada tipologi pertama, tetapi tidak ingin terlibat dalam politik praktis, hanya saja dia terlibat menjadi pendukung calon atau dia mengusung calon. Dalam konteks ini, Tuan Guru merasa bahwa dia tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk ikut terlibat atau terjun dalam kontestasi pemilihan sebagai anggota legislatif atau eksekutif, tetapi dia memiliki calon yang diusung untuk dalam pemilu. Tuan Guru ini dikarenakan dua hal, *pertama*, karena Tuan Guru tersebut adalah tergabung dalam sebuah ormas Islam yang harus mentaati pimpinan organisasi tersebut. yang mana pimpinan organisasi tersebut mencalonkan diri dan ikut berkontestasi pada pemilu atau pilukada. *Kedua*, Tuan Guru tersebut dengan mencalonkan seseorang pada pemilu atau pilukada, akan berharap mendapatkan sumbangan atau bantuan ke madrasahnyanya ketika yang dicalonkan akan terpilih.

Tipologi *ketiga*, Tuan Guru yang tidak berpolitik, yang dalam istilah Suprayogo Tuan Guru spiritual,⁷⁷ yaitu Tuan Guru yang mengfungiskan agama untuk menjaga ketenangan batin, statis dan konservatif, lebih berorientasi pada kehidupan akhirat,

⁷⁵Fahrurrozi, *Dakwah Tuan Guru dan Transformasi Sosial di Lombok Nusa Tenggara Barat* (Disertasi pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 182.

⁷⁶Muhammad Abdun Nasir, dkk, "Polarisasi Thariqat Qahariya-Naqsabandiyah Lombok Pada Pemilu 2004", *Istiqro'*, 5 (2006), hlm. 104.

⁷⁷Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik : Membaca Citra Politik Kyai* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm.124.

tampak lebih tertutup oleh perubahan-perubahan dari luar termasuk dalam menentukan afiliasi politiknya. Serta beranggapan bahwa ketika Tuan Guru terlibat dalam politik praktis akan pudar karismanya.⁷⁸

Kategori-kategori tersebut dirumuskan berdasarkan lebih kepada aktivitas Taun Guru yang menonjol di Lombok. Akan tetapi kategori-kategori ini tidak menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Misalnya Tuan Guru politisi bisa jadi bisa dimasukkan pada Tuan Guru spiritual atau tidak berpolitik pada suatu kasus tertentu atau sebaliknya. Seperti Tuan Guru Nasrullah, adalah salah seorang pengurus jama'ah wirid NW yang merupakan Badan Pengurus Otonom (Banom) NW. Kegiatan wirid dilakukan di lingkungan sekitar rumahnya atau di desa lain yang mengundangnya untuk diijazahkan kepada orang yang memintanya. Di sisi lain Tuan Guru Nasrullah adalah pernah menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur dan sekarang menjadi ketua Bazda (Badan Amil Zakat Daerah) di Lombok Timur.

D. KESIMPULAN

Era reformasi memberikan kebebasan dan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kemudian memunculkan desentralisasi, yang memunculkan inisiator, aktor, dan elit-elit lokal dalam pengaturan daerah. Desentralisasi di Indonesia telah memberikan dampak pada pemberdayaan politik lokal di sebagian besar Indonesia, termasuk di Pulau Lombok.

Pergeseran bentuk pemerintahan sentralistik menjadi desentralisasi ini pun memperlihatkan fenomena baru di Lombok, yaitu munculnya elit-elit lokal, Tuan Guru. Menjadi momentum penting bagi semua kelompok, tidak terkecuali kaum agamawan, Tuan Guru. Momentum ini dapat dipandang sebagai penguatan kesadaran politik dan respon terhadap perubahan serta tantangan yang dihadapi. Atau bisa juga dilihat sebagai strategi politik Tuan Guru untuk merevitalisasi, meredefinisi, dan mereaktualisasi sumberdaya agama (dakwah) yang kemudian dipakai untuk meningkatkan kesadaran politik dan solidaritas antar mereka. Yang kemudian menjadi

⁷⁸Wawancara dengan Fahrurrozi, seorang dosen IAIN Mataram pada tanggal 11 September 2015; Agus Dedi Putrawan, *Dekarismatisasi di Lombok NTB: Studi Tentang Pudarnya Pesona Tuan Guru dalam Politik Pemilihan Umum 2014* (Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm.107.

jalan demokrasi lokal dalam pemilihan langsung seperti yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. atau yang disebut dengan Pemilukada

Pemilukada merupakan salah satu langkah yang maju dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Sejak awal, Pemilu atau Pemilukada, Tuan Guru memainkan peran yang menonjol dalam politik lokal Lombok. Pencalonan Tuan Guru Bajang pada Pilkada 2008, 2013 dan sejumlah Tuan Guru-Tuan Guru lainnya di tingkat Bupati ataupun di Legeslatif di Lombok misalnya memberikan bukti bahwa tokoh agama tidak hanya sebagai pemimpin keagamaan, melainkan juga dapat memimpin pemerintahan. Pencalonan Tuan Guru ini juga memberikan warna pada dinamika politik pada masyarakat Lombok yang sebelumnya selalu dikuasai oleh golongan Bangsawan, *Menak*.

Keterlibatan Tuan Guru dalam politik praktis dibagi menjadi, *pertama* Tuan Guru yang politisi. Yaitu tuan guru yang memfokuskan kegiatannya kepada politik, kegiatan politik lebih dominan dibandingkan dengan memberikan pengajian kepada jama'ah atau para santri. Misalnya Tuan Guru Najmul Akhyar, sebagai politisi di Gerindra dan menjadi Calon Bupati Lombok Utara, Tuan Guru Mahalli Fikri, Politisi Partai Demokrat, Tuan Guru Ahyar Abduh, Polisi Golkar, Tuan Guru Zainul Majdi, Politisi Demokrat sekaligus Gubernur NTB. Tuan Guru *Kedua*, yaitu Tuan Guru yang terlibat dalam politik, tapi hanya menjadi pendulang suara (*vote getter*). Tuan Guru ini tidak begitu terlibat dalam politik praktis, dikarenakan posisinya, akan tetapi lebih kepada pemberian pengajian kepada jama'ah, memberikan layanan kepada jama'ah berupa memimpin doa, serta mendidik santrinya di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Zainal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta : LP3ES, 2003.
- Aragon, Lorraine V., “Persaingan Elit di Sulawesi Tengah,” dalam buku *Politik Lokal di Indonesia*, Henk Schulte Nordhold dan Gerry van Klinken Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Azra, Azyumardi *Islam dan Reformasi; Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Baswedan, Anies Rasyid, *Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia*, Dissertation in Northern Illinois University, 2007.
- Bartholomew, John Ryan, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Budiardjo, Mariam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- David Ray dan Gary Goodpaster “Indonesia Decentralization: Local Autonomy, Trade Barriers, and Discrimination,” in *Autonomy and Disintegration in Indonesia*, eds. Damien Kingsbury, and Herry Aveling, USA: Roudledge, 2012.
- Fahrurrozi, *Dakwah Tuan Guru dan Transformasi Sosial di Lombok Nusa Tenggara Barat* (Disertasi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2009.
- Feit, Harbert dan Lance Castles, (eds), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, Singapore: Equinox Publishing, 2007
- Hadi, Abdul, *Charismatic Leadership and Traditional Islam in Lombok: History and Conflict in Nahdlatul Wathan*, Tesis in The School of Culture, History and Languages The Australian National University, 2010.
- Hadiz, Vedi R., *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspectiv*. Singapore: ISEAS Publishing, 2011
- Hamdi, Saipul and Bianca J. Smith, “Sister, Militias and Islam in Conflict: Questioning ‘Reconciliation’ in Nahlatul Wathan, Lombok, Indonesia,” *Spinger Science and Bisnis*, 2011.
- Hamdi, Saipul, *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi*, Yogyakarta: KKS Yogyakarta, 2014.
- Hamid, Ihsan, *Perilaku Politik Nahdlatul Wathan: Dari Pesantren ke Konflik Elit*, Jakarta: Impresa, 2013.
- Henk Schulte Nordholt and Garry van Klinken, “Introduction” in *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*, eds. Henk Schulte Nordholt and Garry van Klinken, Leiden : KITLV Press, 2007.

- Hidayat, Komarudin dan M Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama: Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Kingsley, Jeremy, *Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia*, Disertasion in Melibourne Law School The university of Melbourne, 2010.
- Niel, Robert van, *Munculnya Elite Modern Indonesia (terj)*, Bogor: Pustaka Jaya, 2009.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, 2007.
- Rasyid, M. Ryaas, "Regional Autonomy and Local Politics in Indonesia", in *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Decentralisation*, eds, Edward Aspinall and Greg Fealy, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2003.
- Sarjono, *Politik Tuan Guru Bajang: Fajar Kebangkitan Demokrasi di Lombok*, Malang: Enzal Press, 2012.
- Syakur, Ahmad Abd., *Islam dan Kebudayaan; Artikulasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*, Yogyakarta: Adab Press, 2006.
- Suprayogo, Imam, *Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kyai*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Smith, Bianca J. and Saipul Hamdi, "Between Sufi and Salafi Subjects: Famale Leadership, Spiritual Power and Gender Matters in Lombok," in *Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufi and Pesantren Selves*, ed. Bianca J. Smith and Mark Woodward, New York: Routledge, 2014.
- Tanasaldy, Taufiq, *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan*, Leiden: KITLV, 2012.
- Zulkarnain, *TGB Inspirator Kebangkitan Politik Kaum Santri*, Lombok : Suara Nusa Niaga Nusantara, 2013.

Jurnal

- Asfar, Muhammad, "Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai", *Prisma*, 5 (1995) : 29-41.
- Fahrurrozi, "Tuan Guru Antara Idealitas Normatif dengan Realitas Sosial pada Masyarakat Lombok" *Jurnal Penelitian Keislaman*, Lemlit IAIN Mataram 7, no. 1, (2010) : 222-250.
- Gayatri, Irene Hiraswati,dkk, *Ringkasan Laporan Penelitian Dinamika Peran Elit Lokal di Pedesaan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Pergeseran Peran Tuan Guru di Lombok Timur*, Jakarta: LIPI, 2010 : 1-17.
- Geertz, Clifford, "The Javanese Kijai: The Changing Role of A Cultural Broker." *Comparative Studies in Society and History*, 2 (1960) : 228-249.
- Hadiz, Verdi R., "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives," *Institut of Social Studies* 35 (2004) : 697-718.

- Hamdi, Saipul, "Politik Islah: Renegosiasi Islah, Konflik dan Kekuasaan dalam Nahdlatul Wathan di Lombok Timur", *Kawistara*, 1 (2011): 1-14.
- Saipul Hamdi and Bianca J. Smith, "Sister's Militias and Islam in Conflict: Questioning 'Reconciliation' in Nahdlatul Wathan, Lombok, Indonesia," *Contemporary Islam*, 6, 1, (2012), 24-43.
- Hunter, Chinthia L. "Local Issues, and Changes: The Post New Order Situation in Rural Lombok", *Sojourn: Jurnal of Social Issues in Southeast Asia*, 19, no. 1, (2004) : 100-112.
- Kingsley, Jeremy J. "Peacemakers or Peace-Breakers? Provincial Elections and Religious Leadership in Lombok, Indonesia", *Indonesia*, no. 93, (April 2012) : 53-82.
- Kingsley, Jeremy J. "Village Election, Violence and Islamic Leadership in Lombok, Eastern Indonesia." *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 27, no. 22, (2012): 285-309.
- Nina Herlina Lubis, "Religious Thoughts and Practices of the Kaum Menak: Strengthening Traditional Power", *Studia Islamika*, 10, no. 2, (2003) : 1-30.
- Nordholt, Henk Schulte, "Renegotiating Boundaries: Access, Agency, and Identity in post-Suharto Indonesia", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 159, No. 4, (2003) : 550-589.
- Ray, David dan Gary Goodpaster "Indonesia Decentralization: Local Autonomy, Trade Barriers, and Discrimination," in *Autonomy and Disintegration in Indonesia*, eds. Damien Kingsbury, and Herry Aveling, USA: Roudledge, 2012.
- Rasyid, M. Ryaas " Regional Outonomy and Local Politics in Indonesia," in *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, eds. Edward Aspinall and Greg Fealy, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2003
- Sutherland, Heather. "The Priyayi", *Indonesia*, no. 19 (Apr., 1975) : 57-77

Internet

<http://female.kompas.com/read/xml/2009/03/06/08335922/menelusuri.jejak.penguasaan.tokoh>

<http://kpud-ntbprov.go.id>

Webset Resmi NW : <http://www.hamzanwadi.ac.id>, diakses pada tanggal 11/12/2015.

<http://www.muhammadiyah.or.id>, diakses pada hari Rabu, 17 Desember 2015.

<http://kpud-tbprov.go.id>, diakses pada tanggal 3/2/2016

<http://dprd-ntbprov.go.id/daftar-anggota-dprd-prov-ntb/> diakses pada tanggal 3/2/2016 .

<http://www.kpu-ntb.org/content/view/100/32/.pemilu>. Diakses pada 3/2/2016.

Hasil penghitungan KPUD NTB. http://kpud-tbprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Item=661=59, diakses pada 3/2/2016.

<http://lombokutarakab.go.id/v1/profil-daerah/sejarah-singkat>.

<https://pilkada2015.kpu.go.id/lombokutarakab>, diakses pada tanggal 3/2/2016.

Wawancara dan Dokumen

Wawancara dengan Rosyadi Sayuti, Kepala Dikpora Provinsi NTB pada 17 September 2015.

Wawancara dengan TGH. Najmul Akhyar pada 21 September 2015.

Wawancara dengan Mukhlis, pada tanggal 20 September 2015.

Wawancara dengan Saipul Fikri pada tanggal 7 September 2015.

Wawancara dengan TGH Yusuf Ma'mun, 7 September 2015

Wawancara dengan TGH. Nasrullah, 8 September 2015

Wawancara dengan Khairul Rizal, Ketua DPRD Lombok Timur, pada 14 September 2015.

Wawancara dengan Fahrurrozi, dosen IAIN Mataram, pada 11 September 2011.

Wawancara dengan TGH Gunawan pada tanggal 9 September 2015.

Wawancara dengan M.Nur pada tanggal 9 Januari 2016

Wawancara dengan Saipul Hamdi pada Sabtu, 1 Januari 2016

Wawancara dengan Abdul Hadi, Dosen IAIH NW Pancor, (7 September 2015)

Wawancara dengan Zunnurain, salah satu Komisioner KPUD Lombok Timur (9 September 2015)

Wawancara dengan Safarwadi (Dosen IAIN Mataram dan Peneliti), pada tanggal 20 Desember 2015.

Wawancara dengan M. Nur pada tanggal 9 Januari 2016.

Hasil Diskusi dan Seminar dan Bedah Buku *Nahdlatul Wathan Era Reformasi; Agama Konflik Komunal dan Peta rekonsiliasi*, pada 9 Januari 2016 di Ponpes Nahdlatul Wathan, Cakung, Jakarta Timur.

Koran Republika, Selasa 9 Februari 2016

Koran Replika, Rabu, 10 Agustus 2016